



DINAS PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Jl. K.H.Ahmad Dahlan Komp.TPI Bonehalang Benteng-Selayar
Kode Pos 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) 21063, Faximile (0414)
21063

Website : <https://dkp.kepulauanselayarkab.go.id>

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 dapat kami selesaikan. Penyusunan LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkaitan dengan fungsi LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kepada para stakeholders maka informasi kinerja yang diungkapkan tidak terbatas pada sasaran yang capaian kinerjanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga meliputi informasi kinerja dari sasaran yang tidak memenuhi target yang ditetapkan berikut penjelasan-penjelasanannya. Selanjutnya guna memenuhi fungsi LAKIP sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, maka informasi yang disajikan dalam LAKIP juga meliputi analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa-masa berikutnya guna mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu : “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia” sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar periode Tahun 2021 - 2026.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas partisipasi, dukungan, dan bantuannya dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan laporan ini. Semoga LAKIP ini berguna bagi kita semua dan dapat memberi sumbangsih yang berarti bagi pembangunan bidang perikanan dan kelautan.


Pt. KEPALA DINAS
ANDRIANY GUSRAM, S.Pi
NIP. 19810825 201001 2 029

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tengah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Perikanan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

LAKIP Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator kinerja sasaran menunjukkan selain keberhasilan juga memiliki kekurangan sebagai tantangan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, ditetapkan 2 tujuan Renstra Dinas dengan 2 indikator kinerja, dan 10 sasaran kinerja dengan 16 indikator kinerja. Dari 18 indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat 12 indikator yang berhasil mencapai target dan 5 indikator yang belum mencapai target sasaran, sementara 1 indikator yang belum dapat diukur karena tidak tersedianya data.

Seiring dengan tuntutan pembangunan dan tata kelola pemerintahan, upaya perbaikan kinerja Dinas Perikanan akan terus dimaksimalkan di waktu mendatang melalui koordinasi dan kerjasama yang baik.


Pjt. KEPALA DINAS

ANDRIANY GUSRAM, S.Pi
NIP. 19810825 201001 2 029

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	3
1.3.1 Struktur Organisasi.....	3
1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.4 Isu-Isu Strategis.....	8
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Perencanaan Kinerja.....	11
2.1.1 Perencanaan Kinerja	11
2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022	17
2.2 Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1 Pengukuran Kinerja.....	29
3.2 Analisis Capaian Kinerja Dinas Peikanan.....	40
3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Tujuan	40
3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	46
3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Program.....	52
3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan	65
3.3 Realisasi Keuangan	73
BAB IV. PENUTUP	80
4.1 Kesimpulan	80
4.2 Tindak Lanjut	83
LAMPIRAN	84

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 01. Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026	12
Tabel 02. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.....	14
Tabel 03. Sasaran, dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022	15
Tabel 04. Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.....	18
Tabel 05. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022	22
Tabel 06. Skala Nilai Peringkat Kinerja Dinas Perikanan	29
Tabel 07. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Formulasi Pengukuran Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2022.....	31
Tabel 08. Sasaran Program, Indikator Kinerja, serta Formulasi Pengukuran Kinerja pada Dinas Perikanan.....	33
Tabel 09. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, serta Formulasi Pengukuran Kinerja pada Dinas Perikanan.....	34
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Dinas Perikanan Berdasarkan Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Tahun 2022.....	37
Tabel 11. Target dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan Tahun 2022	41
Tabel 12. Pengukuran Capaian pada Indikator Nilai PDRB Subsektor Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.....	43
Tabel 13. Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Nilai PDRB Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017- 2022.....	43
Tabel 14. Perbandingan Persentasi Distribusi PDRB Berdasarkan Harga Berlaku Nilai PDRB Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 - 2022.....	44
Tabel 15. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Dasar Harga Konstan (%) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 - 2022.....	45
Tabel 16. Capaian Indikator pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022	48
Tabel 17. Target dan Capaian Indikator Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021	49
Tabel 18. Target dan Capaian Indikator Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Tahun 2022	50
Tabel 19. Target dan Capaian Indikator Kinerja Volume Produksi Perikanan Tahun 2022	51

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 20.	Capaian Persentasi Kinerja Dinas Perikanan Pertriwulan Tahun 2022.....	54
Tabel 21.	Target dan Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2022.....	54
Tabel 22.	Capaian Persentasi Kinerja Keuangan Per Triwulan Tahun 2022.....	55
Tabel 23.	Target dan Capaian Indikator Kinerja Keuangan Dinas Perikanan Tahun 2022	56
Tabel 24.	Data Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan Triwulan Tahun 2022.....	56
Tabel 25.	Target dan Capaian Indikator Kinerja Volume Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar	57
Tabel 26.	Data Produksi Perikanan Budidaya Pertriwulan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.....	59
Tabel 27.	Target dan Capaian Indikator Kinerja Volume Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022	60
Tabel 28.	Capaian Indikator Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2022	63
Tabel 29.	Capaian Indikator Persentasi Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya Dlm Kabupaten/Kota Terhadap Perundang-undangan	65
Tabel 30.	Capaian Indikator Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	67
Tabel 31.	Capaian Indikator Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN) yang Diberdayakan	68
Tabel 32.	Capaian IKU Jumlah Rekomendasi, Tanda Daftar, dan Izin Usaha Perikanan (IUP) yang Usahanya Dalam Satu Daerah Kabupaten /Kota yang Diterbitkan	69
Tabel 33.	Target dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah TPI dan Sentra Pendaratan Ikan yang Operasional	70
Tabel 34.	Capaian Indikator Cakupan Bina Kelompok Perikanan Nelayan Tahun 2022.....	72
Tabel 35.	Capaian Indikator Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan Tahun 2022	73
Tabel 36.	Realisasi Belanja APBD Dinas Perikanan Tahun 2022.....	74
Tabel 37.	Realisasi Belanja Langsung Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022	75

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 01. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	4
Gambar 02. Peta Sasaran Strategis Pelayanan Dinas Perikanan.....	13
Gambar 03. Diagram Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Nilai PDRB Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 – 2022	44
Gambar 04. Diagram Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020 - 2022.....	58
Gambar 05. Diagram Perbandingan Antara Target dan Realisasi Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020 - 2022.....	61
Gambar 06. Diagram Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Volume Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2020 – 2022	63

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 01. Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2022.....	84
Lampiran 02. Rencana Aksi Dinas Perikanan Tahun 2022.....	87
Lampiran 03. Evaluasi Rencana Aksi Dinas Perikanan Tahun 2022.....	94
Lampiran 04. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023.....	102

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas peran birokrasi pemerintah dalam penyelenggaraan tupoksinya, organisasi pemerintah dituntut untuk semakin transparan dan akuntabel, mampu mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan guna mencapai tujuan birokrasi. Demikian pula perubahan dalam lingkungan global menuntut agar manajemen sektor publik dikelola berdasarkan prinsip *Good Governance* dan *Performance Management*.

Good Governance adalah strategi untuk menciptakan institusi masyarakat yang kuat, dan juga untuk membuat pemerintah/publik sektor semakin terbuka, responsif, akuntabel dan demokratis. *Good governance* tidak hanya terkait dengan efisiensi, tapi juga berkaitan dengan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan kepentingan publik kepada stakeholdernya. Ide dasar dari akuntabilitas adalah kemampuan organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan pendorong terwujudnya *good governance*. LAKIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik serta digunakan sebagai media akuntabilitas bagi instansi pemerintah. Olehnya itu setiap unit organisasi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan kepada para stakeholder, yang dituangkan melalui LAKIP. Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dilakukan melalui tahapan antara lain penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Di dalam kerangka akuntabilitas kinerja adalah alat pendorong terwujudnya *good governance* dan dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diberi amanah dalam menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan. Pembentukan Dinas Perikanan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar diikuti dengan pemberian kewenangan dan tanggung jawab dalam pengembangan bidang kelautan dan perikanan. Dengan amanah tersebut, Dinas Perikanan secara periodik mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap amanat tersebut.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Perikanan adalah untuk mewujudkan akuntabilitas dinas kepada Bupati yang memberi mandat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi dinas untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Adapun penyusunan LAKIP ini ditujukan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten

Kepulauan Selayar selama tahun 2022. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

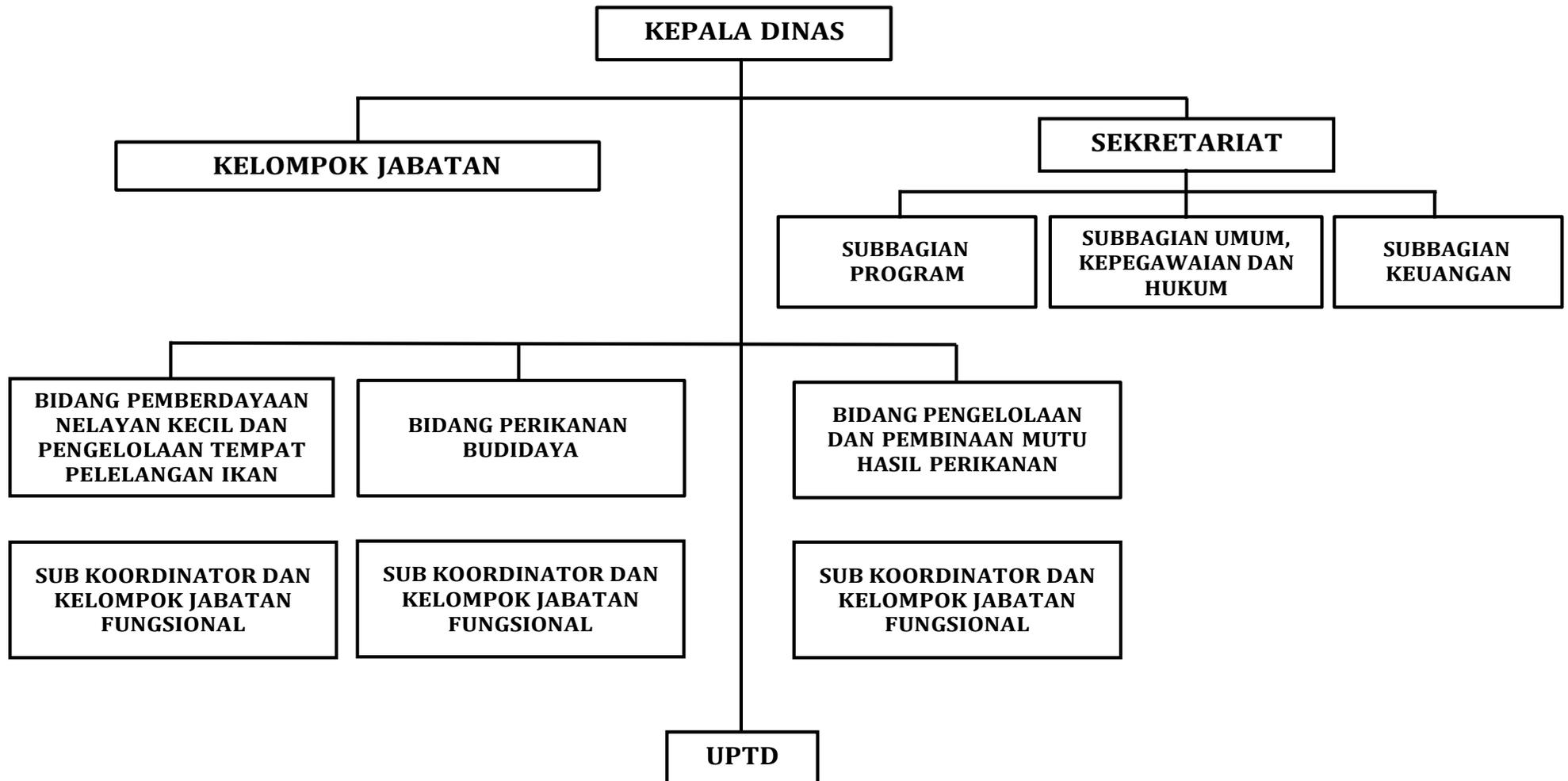
1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 135 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar membentuk Dinas Perikanan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mengemban tugas membangun dan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kedudukan Dinas Perikanan dalam Peraturan Daerah ini adalah merupakan pelaksana Pemerintah Daerah menurut bidangnya yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.3.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 135 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Struktur Organisasi Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

GAMBAR 01.
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Kepala Dinas Perikanan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautandan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Perikanan Kabupaten Selayar adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai kebijakan Bupati dengan memperhatikan petunjuk/pedoman teknis Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

1. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas.;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. menyelenggarakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, danevaluasi kebijakan teknis dibidang perikanan;
9. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan;
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
12. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuaidengan bidang tugasnya.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

b. Sekretaris Dinas

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi di lingkungan Dinas Perikanan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis serta pelayanan administrasi dalam menunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten sesuai fungsi dan kewenangan perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
2. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
3. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian dan hukum;
4. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil Negara lingkup dinas;
5. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan hukum
2. Sub Bagian Program
3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Bidang Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis koordinasinya melalui Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI.

d. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis koordinasinya melalui Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di Bidang Perikanan Budidaya.

e. Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan

Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang secara teknis koordinasinya melalui Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Isu-Isu Strategis

Pembangunan saat ini telah menuntun masyarakat menjadi semakin kritis dalam menyikapi kinerja pelayanan pemerintah, sehingga setiap unit organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan, baik lokal, regional maupun tingkat nasional. Memperhatikan perkembangan masyarakat dari tahun ke tahun selalu ada isu-isu dan permasalahan yang kompleks, dan perlu disikapi oleh Pemerintahan secara lebih bijak dan terarah, sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk menghadapi berbagai isu dan permasalahan yang ada, perlu diantisipasi melalui perencanaan yang matang dan komprehensif, sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Menyikapi isu-isu dan permasalahan di Kabupaten Kepulauan Selayar, terutama masalah Pelayanan perlu diarahkan pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju tata pemerintahan yang baik dan bersih sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah yang dihadapi pada sektor kelautan dan perikanan, perlu disikapi dengan mengacu pada kebijakan dan arah pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis yang

Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINAS PERIKANAN TAHUN 2022

dilakukan, tantangan pelayanan Dinas Perikanan dalam pembangunan daerah tercermin dari isu strategis yang dihadapi sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Peningkatan kualitas hidup dan keberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
3. Optimalisasi daya dukung lingkungan sumberdaya perikanan melalui pengelolaan dan pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.
4. Pengembangan kualitas SDM (keterampilan, teknologi, etos kerja) dan kelembagaan pelaku utama perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar, serta petambak garam).
5. Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan dan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan.
6. Pengembangan dan penyediaan fasilitas dan infrastruktur dan pengembangan fasilitas pada sentra pendaratan ikan.
7. Optimalisasi peran investasi swasta dalam industri bisnis perikanan.
8. Optimalisasi pengembangan usaha yang meliputi pengelolaan usaha, perlindungan dan pengembangan sumberdaya perikanan.
9. Optimalisasi program dan kegiatan budidaya ikan dalam penanganan penyakit ikan dan pengendalian lingkungan pada perikanan budidaya serta pemanfaatan lahan potensial.
10. Optimalisasi peran dan fungsi unit perbenihan (BBI dan UPR) dalam membangun sistem logistik perbenihan
11. Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sistem data dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan dan perikanan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan

Perencanaan kinerja suatu organisasi perangkat daerah diawali dengan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang mengacu kepada RPJMD. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang.

Di dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, merumuskan dan menetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.
5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program maupun kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan perikanan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Adapun penjabaran keterkaitan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan jangka menengah Dinas Perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 diuraikan pada tabel di bawah ini.

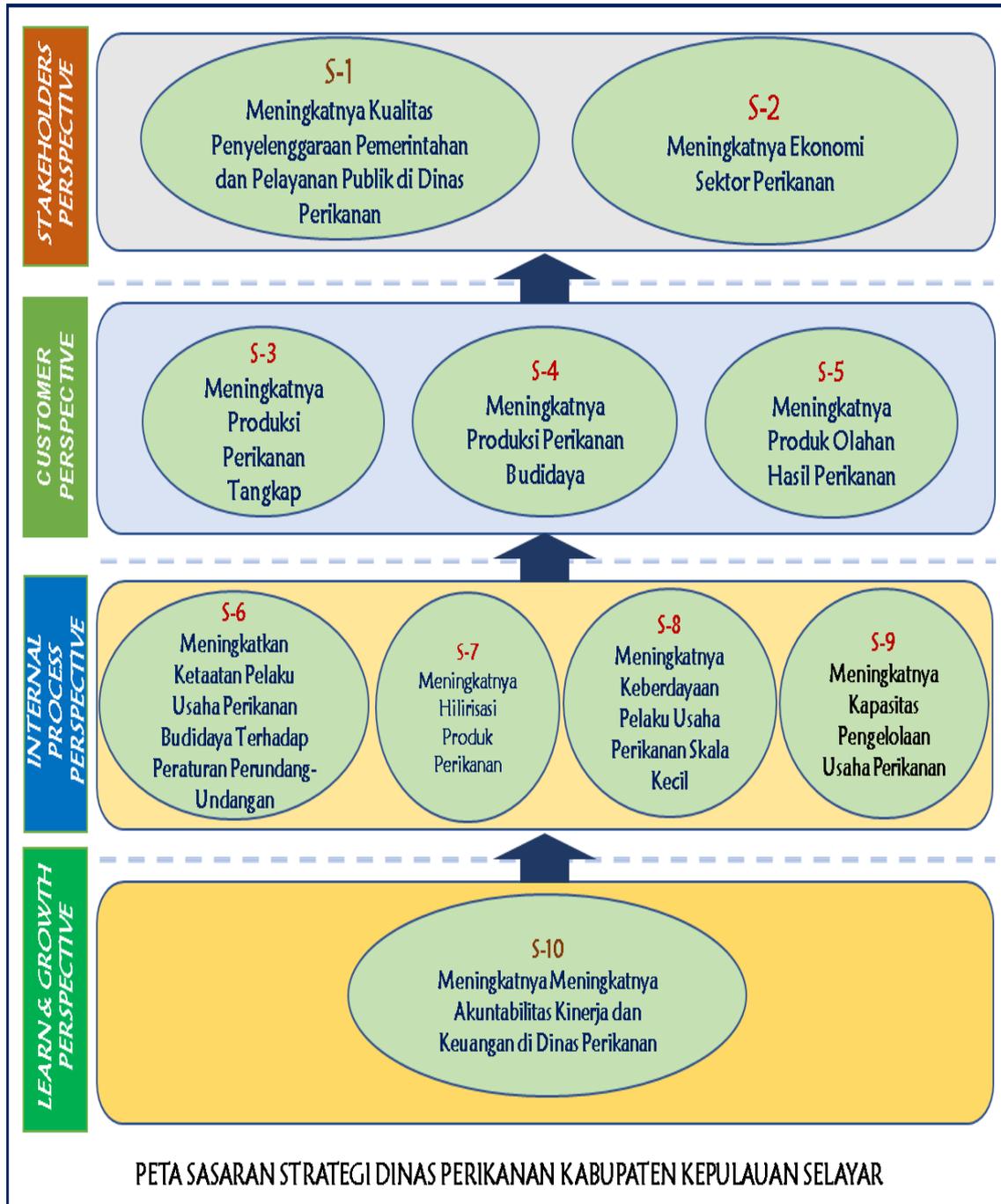
Tabel 01.
Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan
Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021 - 2026

RPJMD KAB. KEP. SELAYAR		RESNTRA DINAS PERIKANAN	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Misi ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah (T-1)	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan (S-1)	Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perikanan (T-1)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Dinas Perikanan (SS-1)
Misi ke-4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan			
Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman (T-4)	Meningkatnya Usaha Perikanan (S-6)	Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Perikanan (T-2)	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan (SS-2)

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD ke dalam sasaran pelayanan Dinas Perikanan digambarkan dengan peta sasaran berdasarkan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni Stakeholders Perspective, Costumer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective, yang digambarkan berikut ini.

Gambar 02.

Peta Sasaran Strategis Pelayanan Dinas Perikanan



Adapun Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut :

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 02.

Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan
Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
Stakeholders Perspective							
Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perikanan (T-1)		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan	55,00 (CC)	64,00 (CC)	68,00 (CC)	73,00 (CC)	76,00 (CC)
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dinas Perikanan (SS-1)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Dinas Perikanan (%)	71,45 %	74,84 %	78,23 %	81,62 %	85,01 %
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perikanan	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	A (>80-90)
		Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Mengoptimalkan pengelolaan potensi perikanan (T-2)		Nilai PDRB Subsektor Perikanan (Rp. 1 M)	1.944,63	2.119,64	2.321,01	2.553,11	2.821,18
	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan (SS-2)	Volume Produksi Perikanan (Ton)	22.822,46	24.648,26	26.620,12	28.749,73	31.049,71

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 03.

Sasaran, dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perikanan
Kabupaten Kepulauan Selayar

Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
Customer Perspective						
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (S-3)	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	21.845,74	23.593,40	25.480,87	27.519,34	29.720,89
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (S-4)	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	976,72	1.054,86	1.139,25	1.230,39	1.328,82
Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan (S-5)	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	186,57	201,49	231,34	249,84	269,82
Internal Process Perspective						
Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (S-6)	Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya Dalam Kabupaten/Kota Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	5,27 %	10,54 %	15,81 %	21,07 %	26,34 %
Meningkatnya Keberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Skala Kecil (S-7)	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)	9.696,07	10.665,68	11.732,25	12.905,47	14.196,02
	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil (POKDAKAN) yang diberdayakan (Klpk)	56	62	71	77	86

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Hilirisasi Produk Perikanan (S-8)	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Sentra pendaratan ikan yang Operasional	1 TPI dan 1 Sentra	1 TPI dan 2 Sentra	1 TPI dan 3 Sentra	1 TPI dan 4 Sentra	1 TPI dan 5 Sentra
	Jumlah Rekomendasi, Tanda Daftar, dan Izin Usaha Perikanan (IUP) yang Usahanya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan	30	58	86	114	142
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Usaha Perikanan (S-9)	Cakupan Bina Kelompok Perikanan Nelayan (%) dari 476 KUB	6,30 % (30 Klp)	12,61 % (60 Klp)	18,91 % (90 Klp)	25,21 % (120 Klp)	31,51 % (150 Klp)
	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan (%) dari 88 POKDAKAN	18,18 % (16 Klp)	39,77 % (35 Klp)	53,41 % (47 Klp)	75,00 % (66 Klp)	92,05 % (81 Klp)
Learning and Growth Perspective						
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Dinas Perikanan (S-10)	Persentasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan (%)	63,03 %	70,28 %	70,53 %	71,51 %	72,31 %
	Persentasi Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perikanan (%)	83 %	85 %	88 %	91 %	95 %

Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINAS PERIKANAN TAHUN 2022

2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

Berdasarkan isu permasalahan dan tugas pokok yang diemban oleh Dinas Perikanan, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 dan Renstra perangkat daerah, maka Dinas Perikanan mewujudkan tujuan dan sasaran melalui Rencana Kerja Tahunan dengan 5 (lima) program, 19 (Sembilan belas) kegiatan dan 60 (enam puluh) Sub Kegiatan.

Program tersebut terdiri atas 1 (Satu) program generik yang bersifat dukungan dan layanan sekretariat dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 3 (Tiga) program teknis dengan 10 (sepuluh) kegiatan. Adapun program dan kegiatan Dinas Perikanan tahun 2022 terurai di bawah ini dan dapat dilihat pada table berikut ini.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 04.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Dinas Perikanan (SS-1)	Meningkatnya Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perikanan	B (>60-70)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. /Kota : <u>Kegiatan :</u> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 340.468.750,-
		Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Sesuai	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 3.423.160.700,- Rp. 13.792.200,- Rp. 29.055.650,- Rp. 108.645.050,-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Dinas Perikanan (%)	71,45 %	6. Administrasi Umum Perangkat Daerah 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 262.485.500,- Rp. 8.600.215,- Rp. 413.391.447,- Rp. 202.558.379,-

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator		Target	Program/Kegiatan	Anggaran
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan (SS-2)	Volume Produksi Perikanan (Ton)	Volume Produksi Perikanan Tangkap	21.845,74	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap <u>Kegiatan :</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 	<p>Rp. 75.000.000,-</p> <p>Rp. 4.023.293.600,-</p> <p>Rp. 504.00.000,-</p>
			Volume Produksi Perikanan Budidaya	976,72	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya <u>Kegiatan :</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Pemberdayaan Pembudi daya Ikan Kecil 4. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 	<p>Rp. 24.508.000,-</p> <p>Rp. 29.455.000,-</p> <p>Rp. 70.430.000,-</p> <p>Rp. 747.277.740,-</p>

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
		Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	186,57	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan : <u>Kegiatan :</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro 3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 	<p>Rp. 51.690.000,-</p> <p>Rp. 67.350.000,-</p> <p>Rp. 931.703.150,-</p>

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang tersedia.

Pada perjanjian kinerja tersebut terdapat 2 sasaran strategis (SS) yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Kepulauan Selayar di Bidang Kelautan dan Perikanan. Untuk setiap Sasaran Strategis yang disusun dan ditetapkan memiliki tolak ukur yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target. Adapun dokumen penetapan kinerja yang dimaksud ditampilkan pada tabel 05. di bawah ini :

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 05.
Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Dinas Perikanan (SS-1)	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Dinas Perikanan	%	71,45	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja
		Meningkatnya Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perikanan	Skala Predikat	B (>60-70)		

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

		Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Skala Predikat	Sesuai	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
					3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

					4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 2. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 3. Penyuluhan dan Penyebarluasan 4. Kebijakan Retribusi Daerah Pengolahan Data Retribusi Daerah
					5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
					6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

					8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesinnya Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan (SS-2)	Volume Produksi Perikanan Tangkap	Ton	21.845,74	1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

					2.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi
							2.	Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
							3.	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
					3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
							2.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
		Volume Produksi Perikanan Budidaya	Ton	976,72	1.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

					2.	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. 2.	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah
					3.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1. 2.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
					4.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1. 2. 3. 4.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

							5.	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
							6.	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
		Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	186,57		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikan		
					1.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah
					2.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro	1.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan kecil
					3.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
							2.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota

**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Formulasi Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Tabel 06.
Skala Nilai Peringkat Kinerja Dinas Perikanan

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINAS PERIKANAN TAHUN 2022

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja secara periodik. Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan berpedoman pada formula perhitungan yang telah ditetapkan dalam informasi kinerja atau evaluasi kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Perikanan. Pengukuran kinerja Dinas Perikanan dilakukan terhadap indikator kinerja pada sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sasaran strategis Dinas Perikanan merupakan penjabaran dari sasaran pada tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan penjabaran sesuai tugas dan fungsi Dinas Perikanan, terdapat 2 (dua) tujuan dalam Renstra Dinas dengan 2 (dua) indikator kinerja, 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Adapula indikator capaian kinerja pada sasaran program dan kegiatan, dimana terdapat 5 (lima) sasaran program dengan 6 (enam) indikator kinerja dan 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja.

Indikator kinerja pada sasaran strategis merupakan indikator untuk melihat kinerja pada level dampak (*impact*). Sedangkan indikator program merupakan indikator pada level hasil (*outcome*) dan indikator kegiatan adalah indikator pada level proses (*intermediate outcome/proces*).

Berikut ini uraian sasaran strategis, sasaran program dan kegiatan serta indikatornya serta formulasi pengukuran kinerja masing-masing indikatornya.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 07.
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Formulasi Pengukuran Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2022

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
	Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan			
Tujuan ke-1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah (T-1)	Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perikanan (T-1)	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (<i>Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020</i>)	Hasil Penilaian PMPRB oleh Inspektorat Kab. Kepulauan Selayar
Sasaran Ke-1.	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan (S-1)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik Dinas Perikanan (SS-1)	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Dinas Perikanan	<p><u>Capaian IKM atas pelayanan SKPD :</u> <i>Interval Penilaian IKM (Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017) :</i> A (Sangat Baik) : 88,31 – 100,00 B (Baik) : 76,61 – 88,30 C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99</p>	Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			Meningkatnya Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perikanan	<p><u>Capaian Nilai LAKIP SKPD</u> <i>Kategorisasi Nilai LAKIP (PERMEN PAN DAN RB Nomor : 12 Tahun 2015) :</i> AA (Sangat Memuaskan) : >90-100, A (Memuaskan) : > 80-90, BB (Sangat Baik) : > 70-80, B (Baik) : > 60-70, CC (Cukup) : > 50-60, C (Kurang) : > 30-50, dan D (Sangat Kurang) : 0-30</p>	Hasil Penilaian LAKIP Dinas Perikanan oleh Inspektorat Daerah

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

			Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah	$\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang telah berstandar SAP}}{\text{Total Laporan Keuangan SKPD}}$	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tujuan ke-2	Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman (T-5)	Mengoptimalkan pengelolaan potensi perikanan (T-2)	Nilai PDRB Subsektor Perikanan (Rp. 1 M)	Perhitungan PDRB SubSektor Perikanan Terhadap Total PDRB Kabupaten atas dasar harga berlaku	BPS Kab. Kepulauan Selayar
Sasaran Ke-2.	Meningkatnya Usaha Perikanan (S-6)	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan (SS-2)	Volume Produksi Perikanan (Ton)	Total volume (produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya) pada tahun n	Laporan Hasil Pendataan Produksi Perikanan Tangkap
					Laporan Hasil Pendataan Produksi Perikanan Budidaya

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 08.
Sasaran Program, Indikator Kinerja, serta Formulasi Pengukuran Kinerja pada Dinas Perikanan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik Dinas Perikanan (S_10)	Capaian Kinerja Dinas Perikanan (%)	$\frac{\text{Jumlah realisasi Fisik Kegiatan tahun n}}{\text{Total Kegiatan Fisik yang dikelola tahun n}} \times 100 \%$	Laporan Realisasi Fisik Kegiatan Akhir Tahun Dinas Perikanan
		Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perikanan (%)	$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran tahun n}}{\text{Total anggaran yang dikelola tahun n}} \times 100 \%$	Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perikanan
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (S_3)	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun n	Laporan Hasil Pendataan Produksi Perikanan Tangkap
3.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (S_4)	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun n	Laporan Hasil Pendataan Produksi Perikanan Budidaya
4.	Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan (S_5)	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	Jumlah produk olahan hasil perikanan pada tahun n	Laporan Hasil Pendataan Produk Olahan Hasil Perikanan
5.	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Terhadap Peraturan Per-UU (S_6)	Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya dlm Kabupaten /Kota Terhadap Perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah Pembudidaya Perikanan yang telah mengikuti Ketentuan PerUndang2an}}{\text{Total Pembudidaya Ikan dalam Kabupaten/kota}} \times 100 \%$	Laporan Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 09.

Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, serta Formulasi Pengukuran Kinerja pada Dinas Perikanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1.	Meningkatnya Keberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Skala Kecil (S_7)	Persentasi Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (% & Ton)	$\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Kelompok Nelayan}}{\text{Total Produksi Perikanan Tangkap}} \times 100 \%$	Laporan Hasil Pendataan Produksi Kelompok Nelayan
		Persentasi Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil (POKDAKAN) yang diberdayakan (% dan Kelompok)	$\frac{\text{Jumlah POKDAKAN yang diberdayakan}}{\text{Total POKDAKAN dalam daerah Kabupaten/kota}} \times 100 \%$	Laporan Data dan Informasi Perikanan Budidaya
2.	Meningkatnya Hilirisasi Produk Perikanan (S_8)	Jumlah Rekomendasi, Tanda Daftar, dan Izin Usaha Perikanan (IUP) yang Usahanya Dalam Satu Daerah Kabupaten /Kota yang Diterbitkan	Jumlah layanan dan fasilitasi terhadap rekomendasi usaha, Tanda Daftar dan Izin Usaha Perikanan yang Usahanya Dalam Satu Daerah Kabupaten yang diterbitkan pada tahun n	Laporan Data dan Informasi Perikanan Budidaya
				Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
				Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

	Meningkatnya Hilirisasi Produk Perikanan <i>(lanjutan...)</i>	Jumlah TPI dan Sentra pendaratan ikan yang Operasional	Jumlah TPI dan Sentra Pendaratan Ikan yang memiliki fasilitas pendaratan ikan dan sarana rantai dingin yang operasional	Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI Laporan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan
3.	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Usaha (S_9)Perikanan	Cakupan Bina Kelompok Perikanan Nelayan (% & KUB)	$\frac{\text{Jumlah KUB yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah}}{\text{Total Kelompok Nelayan dalam daerah Kabupaten/kota}} \times 100 \%$	Laporan Data dan Informasi Perikanan Tangkap
		Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan (% dan POKDAKAN)	$\frac{\text{Jumlah POKDAKAN yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah}}{\text{Total POKDAKAN dalam daerah Kabupaten/kota}} \times 100 \%$	Laporan Data dan Informasi Perikanan Budidaya

Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINAS PERIKANAN TAHUN 2022

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran secara periodik. Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Sasaran dilakukan dengan berpedoman pada formula perhitungan yang telah ditetapkan dalam informasi kinerja atau evaluasi kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Perikanan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan atau evaluasi monitoring realisasi kegiatan dan keuangan pada Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Terdapat 18 (delapan belas) indikator kinerja sebagai parameter pengukuran capaian pada 2 (dua) tujuan Renstra Dinas, dan 10 (sepuluh) sasaran, yang terbagi atas 2 (dua) Sasaran Strategis, 5 (lima) Sasaran Program, dan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan berdasarkan Renstra Dinas Perikanan tahun 2021-2026.

Berikut ini uraian dan analisis capaian masing-masing indikator kinerja berdasarkan sarannya masing-masing :

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 10.
Capaian Indikator Kinerja Dinas Perikanan
Berdasarkan Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan
Tahun 2022

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perikanan (T-1)	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan		Skala Predikat	CC (55)	18,75	34,09
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Dinas Perikanan (SS-1)	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Dinas Perikanan	%	71,45	74,60	104,41
		2.	Meningkatnya Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perikanan	Skala Predikat	B (>60-70)	58,36	97
		3.	Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		Sesuai	Sesuai	100
	Mengoptimalkan pengelolaan potensi perikanan (T-2)	Nilai PDRB Subsektor Perikanan		Rp. 1 M	1.944,63	2.026,63	104,22
2.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan (SS-2)	4.	Volume Produksi Perikanan	Ton	22.822,46	21.766,90	95,37

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik Dinas Perikanan (S_10)	5.	Capaian Kinerja Dinas Perikanan	%	63,03	94,30	149,61
		6.	Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perikanan	%	83	97,39	117,33
4.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap(S_3)	7.	Volume Produksi Perikanan Tangkap	Ton	21.845,74	21.223,40	97,15
5.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya(S_4)	8.	Volume Produksi Perikanan Budidaya	Ton	976,72	543,50	55,64
6.	Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan(S_5)	9.	Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	186,57	241,77	129,59
7.	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Terhadap Peraturan Per-UU (S_6)	10.	Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya dlm Kabupaten /Kota Terhadap Perundang-undangan	%	5,27	0	0

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
8.	Meningkatnya Keberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Skala Kecil (S_7)	11.	Persentasi Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Ton	9.696,07	5.881,25	60,66
		12.	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDKAN) yang diberdayakan	Klp	4	7	175
9.	Meningkatnya Hilirisasi Produk Perikanan (S_8)	13.	Jumlah Rekomendasi, Tanda Daftar, dan Izin Usaha Perikanan (IUP) yang Usahanya Dalam Satu Daerah Kabupaten /Kota yang Diterbitkan	Rek	30	33	110
		14.	Jumlah TPI dan Sentra pendaratan ikan yang Operasional	Lokasi	1 TPI dan 1 Sentra	1 TPI dan 1 Sentra	100
10.	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Usaha (S_9)Perikanan	15.	Cakupan Bina Kelompok Perikanan Nelayan (%) dari 476 KUB	KUB	30	68	226,67
		16.	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan (%) dari 88 POKDAKAN	POKDAKAN	16	18	112,5

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA DINAS PERIKANAN

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi kedalam 2 (dua) tujuan yakni :

1. Tujuan (T-1) yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perikanan;
2. Tujuan (T-2) yaitu Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Perikanan;

Berikut ini analisis masing-masing Tujuan Dinas Perikanan:

1. Tujuan (1) : Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perikanan (T-1)

Tujuan mewujudkan reformasi birokrasi di Dinas Perikanan diukur dengan 1 (satu) indikator yakni Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hasil penilai oleh inspektorat disajikan pada tabel 11.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 11.
Target dan Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi
Dinas Perikanan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan	%	55	18,75	Capaian Nilai PMPRB belum mencapai target Dan berdasarkan <i>Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020</i> nilai tersebut berada dalam interval > 0-30
Sumber : Hasil Penilaian PMPRB oleh Inspektorat Kab. Kepulauan Selayar, Tahun 2022				

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan indeks reformasi birokrasi Dinas Perikanan hanya mencapai 18,75 persen dari target yang ditetapkan. Berikut ini beberapa catatan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk pemenuhan LKE unit kerja :

- a. Beberapa perangkat daerah belum menyusun rencana aksi dan rencana kerja reformasi birokrasi sesuai dengan pemenuhan 8 (delapan) area intervensi;
- b. Beberapa perangkat daerah belum melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang rencana kerja reformasi birokrasi unit kerja;
- c. Beberapa perangkat daerah belum melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh unit kerja untuk dilakukan harmonisasi dan revisi yang bersifat menghambat;
- d. Sebagian besar perangkat daerah belum menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan belum dilaksanakan evaluasi, sehingga SOP yang telah ada belum dapat menjawab kesesuaian efektivitas hubungan kerja

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

antar unit organisasi dengan kinerja;

- e. Beberapa perangkat daerah belum mengimplementasikan aturan disiplin dan belum melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin;
- f. Beberapa perangkat daerah belum mengimplementasikan, mengintegrasikan, memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pengawasan internal lingkup unit kerja untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diusulkan menuju WBK dan WBBM;
- g. Beberapa perangkat daerah perlu meningkatkan kualitas terhadap pelayanan publik dengan melakukan perbaikan standar pelayanan tingkat unit kerja dan mengupayakan menindaklanjuti kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan standar.

2. Tujuan (2) : Mengoptimalkan pengelolaan potensi perikanan (T-2)

Tujuan mengoptimalkan pengelolaan potensi diukur dengan 1 (satu) indikator yakni Nilai PDRB Subsektor Perikanan.

PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu daerah. Sehingga PDRB subsektor kelautan dan perikanan merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu daerah pada subsektor kelautan dan perikanan.

Berikut perbandingan antara target dan realisasi indikator Nilai PDRB subsektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 12.
Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Nilai PDRB Subsektor Perikanan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Nilai PDRB Subsektor Perikanan (Rp. M)	Nilai Rupiah	1.944,63	2.026.63	104	Sangat tinggi
Sumber : Rilis Laporan BPS Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022						

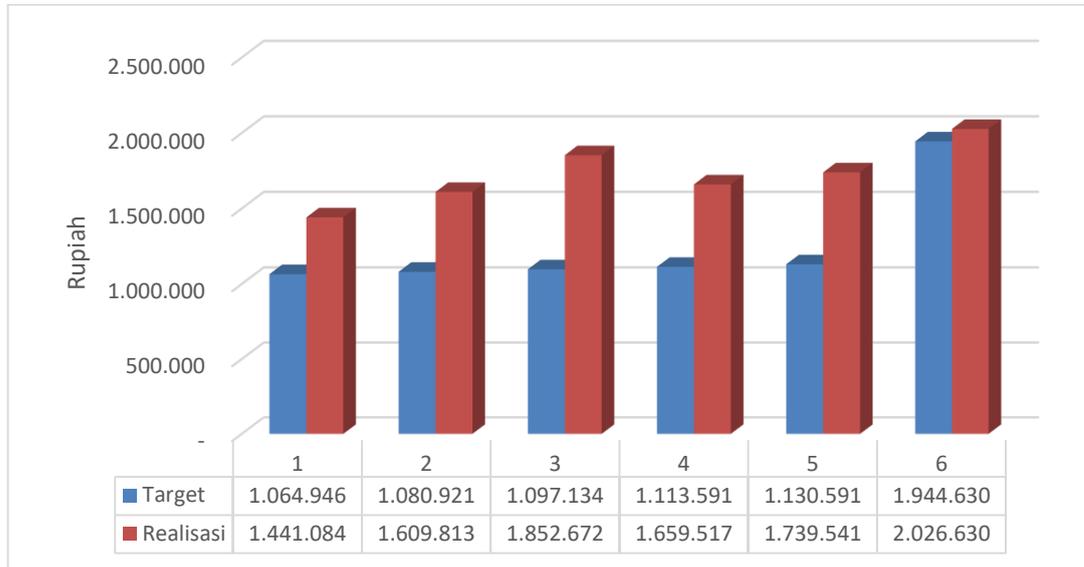
Tabel 13.
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indikator Nilai PDRB Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 - 2022

Kontribusi Nilai PDRB Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar dan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Berdasarkan Harga Berlaku (Rp. 1000.000)						
Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Kabupaten Kep. Selayar	5.223.199,38	5.857.277,94	6.444.224,78	6.392.741,35	6.835.395,93	7.480.469,86
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.394.853,48	2.645.712,88	2.879.614,99	2.712.877,07	2.913.584,80	3.268.730,34
Sub Sektor Perikanan	1.441.084,49	1.609.813,46	1.852.671,67	1.659.516,80	1.739.540,56	2.026.629,66

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Gambar 3.

Diagram Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indikator Nilai PDRB Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017- 2022 (Rp. 1.000.000)



Tabel 14.

Perbandingan Persentasi Distribusi PDRB Berdasarkan Harga Berlaku Nilai PDRB Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 - 2022

Distribusi PDRB Dasar Harga Berlaku (%)							
Uraian		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A.	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	45,85	45,17	44,69	42,44	42,62	43,70
A.3	Sub Sektor Perikanan	27,59	27,48	28,75	25,96	25,45	27,09

Dilihat dari uraian tabel PDRB tersebut di atas, maka pencapaian nilai indikator terhadap target PDRB subsektor perikanan dikatakan tercapai dengan nilai 104 %. Nilai kontribusinya terhadap PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sangat tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 43,70 %, dan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar cukup signifikan setiap tahunnya, dengan nilai rata-rata sebesar 27,09 %. Pencapaian Nilai PDRB subsektor

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

perikanan sebagai bagian dari indikator makro ekonomi didukung semua program, kegiatan, dan anggaran pada Dinas Perikanan tahun 2022.

Tabel 15.
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Dasar Harga Konstan (%)
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 - 2022

Laju Pertumbuhan PDRB Dasar Harga Konstan (%)							
Uraian		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar		7,61	8,75	7,68	-1,78	4,02	3,67
A.	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,23	7,99	7,64	-7,12	3,27	2,62
A.3	Sub Sektor Perikanan	10,39	10,53	13,44	-11,32	3,51	5,59

Capaian kinerja PDRB subsektor perikanan tahun 2022 telah melebihi dari target, nilai dan laju pertumbuhan PDRB subsektor perikanan sudah meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya (lihat tabel.20). Laju pertumbuhan PDRB sub sector perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 5,59 tahun 2022, hal ini menandakan sudah semakin membaiknya produksi dan nilai produksi perikanan terdampak pandemic covid-19.

Walaupun laju pertumbuhan PDRB sudah semakin membaik dari tahun sebelumnya, tapi masih perlu dilakukan upaya-upaya agar laju pertumbuhan tersebut lebih meningkat dan stabil dengan menetapkan arah kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat perikanan melalui kegiatan penguatan sarpras produksi, pengembangan fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan penguatan kapasitas dan pemberdayaan kelompok.

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis (SS)

Sasaran strategis yang merupakan capaian manfaat (*benefit*) dari tujuan dan sasaran tertinggi atas pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 2 (dua) sasaran, yakni :

1. Sasaran Strategis (SS_1) yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Dinas Perikanan;
2. Sasaran Strategis (SS_2) yaitu meningkatnya produksi perikanan.

Berikut ini analisis masing-masing Capaian Sasaran Strategis Dinas Perikanan tahun 2022 :

1. **Sasaran Strategis (1) :** Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Dinas Perikanan (SS-1).

Sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di Dinas Perikanan diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yakni :

1. Meningkatnya Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perikanan;
2. Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Dinas Perikanan (%)

Indikator 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Dinas Perikanan (%)

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINAS PERIKANAN TAHUN 2022

Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimaksudkan sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, sehingga dapat dijadikan acuan dalam rangka perbaikan dan pendorong bagi penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Perhitungan IKM suatu penyelenggara layanan publik didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2017 Nomor 14 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

IKM Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022, merujuk pada Laporan Hasil Survei IKM Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda yang bekerjasama dengan PPKP-LPPM UNHAS. Dari laporan tersebut diketahui bahwa nilai IKM atas pelayanan Dinas Perikanan sebesar 74,60 % dari target IKM sebesar 71,45 % atau dapat dikatakan bahwa realisasi indikator IKM melebihi target indikator.

Namun demikian capaian kinerja Dinas Perikanan atas IKM ini berdasarkan indeks yang ditetapkan Permen PAN dan RB, masih berada pada interval 65,00 – 76,60 atau masih dalam kategori “**kurang baik**”.

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel.16
Capaian Indikator pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	71,45	74,60	Rasio antara realisasi dan target : $\geq 100\%$ Tetapi berdasarkan PermenPANRB nilai tersebut berada dalam kategori Kurang Baik
Sumber : Laporan Akhir Survei Kepuasan Masyarakat tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kab. Kepulauan Selayar, Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022				

Berdasarkan uraian di atas, maka ke depan diperlukan langkah dan perbaikan baik terhadap penyesuaian target indikator kinerja IKM pada Renstra berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, serta perbaikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik Dinas Perikanan.

Indikator 2 : Meningkatnya Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perikanan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Instansi Pemerintah dan/atau unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyusunan Laporan ini didasarkan pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 sementara penilaian kinerja didasarkan pada Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015.

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Hasil Evaluasi dan penilaian atas LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2021 telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten pada tahun 2022. Pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini diuraikan berdasarkan hasil penilaian LAKIP Dinas Perikanan yang diuraikan secara periodik selama periode RENSTRA sampai Tahun 2026, diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 17.
Target dan Capaian Indikator Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perikanan	%	65-70	58,36	Capaian Nilai LAKIP belum mencapai target Dan berdasarkan PermenPANRB nilai tersebut berada dalam interval > 50-60 dengan kategori CC
Sumber : Laporan Penilaian LAKIP DKP Tahun 2021. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2022				

Untuk memenuhi ketercapaian target, masih perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan pada :

1. Dokumen perencanaan baik tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan;
2. Beberapa pernyataan dan penetapan Indikator Kinerja yang belum selaras dengan program dan kegiatan sehingga pengukuran kinerja sulit dilaksanakan;
3. Belum dilaksanakannya review dokumen Rencana Strategis Dinas;
4. Membangun kesepahaman dan koordinasi antara unit organisasi dalam menyusun dokumen perencanaan, pengumpulan data dan evaluasi kinerja.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Indikator 3 : Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Penyusunan laporan keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Tabel 18.
Target dan Capaian Indikator Kinerja Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kategori
Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		Sesuai	Sesuai	100%	Sangat Tinggi
Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Selayar, Tahun 2022					

2. Sasaran Strategis (2) : Meningkatnya Produksi Perikanan (SS-2).

Sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yaitu Volume Produksi Perikanan. Produksi perikanan merupakan jumlah produksi perikanan tangkap dengan produksi perikanan budidaya. Pengukuran produksi ini menggunakan metode pendataan statistik perikanan. Adapun Realisasi volume produksi perikanan tahun 2022 sebesar 21.766,90 Ton atau 95,5% dari target yang telah ditetapkan (tabel. 19).

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 19.
Target dan Capaian Indikator Kinerja
Volume Produksi Perikanan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kategori
Volume Produksi Perikanan	Ton	22.822,46	21.766,90	95,37	Sangat Tinggi
Sumber : Laporan Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2022					

Belum tercapainya target produksi perikanan tahun 2022 disebabkan oleh:

1. Produktifitas pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya masih rendah;
2. Usaha perikanan masih didominasi dan dicirikan oleh usaha kecil dan mikro;
3. Keberdayaan pelaku usaha perikanan masih rendah (pendidikan, sarana, keterampilan, kelembagaan, teknologi, dan akses permodalan);
4. Masih tingginya kegiatan transaksi ikan di atas kapal (*transshipment*) dan belum maksimalnya ketersediaan sarana dan fasilitas pendaratan pada sentra dan subsentra pendaratan yang ada.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menanggulangi permasalahan diatas antara lain :

1. Memaksimalkan kegiatan pemberdayaan pelaku usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya dalam kewenangan kabupaten/kota;
2. Memaksimalkan fungsi-fungsi pendaratan ikan dan rantai pasok pada sentra dan subsentra pendaratan yang ada melalui penyediaan sarana dan fasilitas pendaratan ikan;
3. Mendorong investasi dan memfasilitasi tata niaga dan rantai nilai produk-produk perikanan.

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Program

Sasaran Program merupakan capaian hasil (*outcome*) dari tujuan dan sasaran atas pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 5 (lima) sasaran yang didukung oleh 5 (lima) program Dinas. Berikut ini sasaran program beserta indikator kerjanya, serta dukungan program dinas :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Dinas Perikanan (S_10). Sasaran program ini memiliki 2 (dua) indikator yakni Persentasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Persentasi Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perikanan. Sasaran ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Kota/Kabupaten;
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (S_3). Sasaran program ini memiliki 1 (satu) indikator yakni Volume Produksi Perikanan Tangkap. Sasaran ini didukung oleh Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ;
3. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (S_4). Sasaran program ini memiliki 1 (satu) indikator yakni Volume Produksi Perikanan Budidaya. Sasaran ini didukung oleh Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
4. Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan (S_5). Sasaran program ini memiliki 1 (satu) indikator yakni Produksi Olahan Hasil Perikanan. Sasaran program ini didukung oleh Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ;
5. Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Terhadap Peraturan Per-UU (S_6). Sasaran program ini memiliki 1 (satu) indikator yakni Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya dlm Kabupaten /Kota Terhadap Perundang-undangan. Sasaran ini, belum dilakukan pengukuran pada tahun 2022 karena tidak adanya anggaran yang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINAS PERIKANAN TAHUN 2022

dialokasikan pada sasaran program tersebut. Sasaran ini didukung oleh Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Berikut analisis capaian kinerja masing-masing Sasaran Program Dinas Perikanan Tahun 2022 :

1. Sasaran Program (1) : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Dinas Perikanan (S-10)

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (S-10) sebagai salah satu sasaran kinerja Dinas Perikanan didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran program ini merupakan pendukung utama (*learn and growth perspective*) organisasi perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kinerja dinas yang lainnya. Dalam rangka mencapai sasaran program tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yakni :

Indikator 1 : Persentasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan

Pencapaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Capaian kinerja Dinas diukur dari pencapaian realisasi fisik Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Perikanan. Capaian kinerja Dinas Perikanan per triwulan tahun 2022 disajikan pada grafik dibawah ini :

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 20.
Capaian Persentasi Kinerja Dinas Perikanan
Pertriwulan Tahun 2022.

Indikator Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
Capaian Kinerja Dinas Perikanan	5.99	15.72	25.96	46.63	94,30
Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perikanan KabupatenKepulauan Selayar, Tahun 2022					

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas menunjukkan setiap triwulan mengalami peningkatan, dimana capaian tertinggi terjadi di triwulan ke-4. Untuk pencapaian kinerja terhadap target capaian tahun 2022 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 21.
Target dan Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kategori
Capaian Kinerja Dinas Perikanan	%	63,03	94,30	149,61	Sangat Tinggi
Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2022					

Capaian kinerja Dinas Perikanan tahun 2022 telah melebihi target yang telah ditetapkan. Tercapainya tarket ini mengindikasikan bahwa program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan terlaksana dengan baik. Meskipun demikian dapat dikatakan bahwa target kinerja pada indikator ini terlihat masih rendah, sehingga diperlukan perbaikan dan revisi target pada Renstra Dinas Perikanan.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Indikator 2 : Persentasi Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perikanan

Indikator ke-2 pada Sasaran Program ini adalah Capaian Kinerja Keuangan. Kinerja keuangan didefinisikan sebagai tingkat capaian pengelolaan keuangan terhadap target yang telah ditetapkan pada periode waktu tertentu. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan tingkat serapan belanja keuangan terhadap target pengelolaan belanja keuangan pada periode waktu tertentu. Indikator tingkat serapan belanja keuangan ini dapat digunakan sebagai salah satu instrument untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Program/Kegiatan/Subkegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Capaian kinerja keuangan Dinas Perikanan pertriwulan tahun 2022 disajikan grafik dibawah :

Tabel 22.
Capaian Persentasi Kinerja Keuangan
Per Triwulan Tahun 2022.

Indikator Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
Capaian Kinerja Dinas Keuangan Perikanan	5.99	15.72	28.58	47.1	97,39

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2022

Berdasarkan tabel capaian kinerja keuangan diatas menunjukkan setiap triwulan mengalami peningkatan, dimana capaian tertinggi terjadi di triwulan ke-4. Pencapaian kinerja keuangan Dinas Perikanan tahun 2022 sebesar 97,39 % dari target 83 % atau 117,33 % dari target yang dtetapkan. Gambaran capaian kinerja pada indikator ini dapat dilihat tabel dibawah:

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 23.
Target dan Capaian Indikator Kinerja Keuangan
Dinas Perikanan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kategori
Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perikanan	%	83	97,39	117,33	Sangat Tinggi
Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2022					

2. Sasaran Program (2) : Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap (S-3)

Sasaran program meningkatnya produksi perikanan tangkap didukung oleh Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Pengukuran capaian kinerja sasaran program ini dilakukan melalui 1 (satu) indikator kinerja yakni Volume Produksi Perikanan Tangkap. Produksi perikanan tangkap didefinisikan sebagai jumlah volume produksi perikanan hasil tangkapan yang didaratkan di tempat-tempat pendaratan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sehingga estimasi produksi perikanan hanya ditujukan pada produksi perikanan yang didaratkan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pengukuran indikator kinerja produksi perikanan tangkap dilakukan dengan metode statistik perikanan dengan teknik sampling yakni melakukan perhitungan produksi perikanan melalui desa sampel yang dipilih secara sengaja melalui kerangka survei. Pengumpulan data dilakukan oleh petugas statistik Dinas Perikanan. Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2022 dan analisa perbandingan antara target dan realisasi capaian berdasarkan indikator kinerja disajikan pada tabel di bawah ini secara berturut-turut.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 24.
Data Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan Triwulan Tahun 2022

No	Uraian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
1.	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1,673.90	6,332.80	7,547.00	5,669.70	21,223.40
Sumber : Laporan Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Tangkap Dinas Perikanan, Tahun 2022						

Tabel diatas menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap tertinggi terjadi pada triwulan ke-3 kemudian disusul triwulan ke-2 dan triwulan ke-4, sementara produksi terendah berada pada triwulan ke-1. Hal ini dapat dipahami sebagai dampak musim ombak sehingga banyak nelayan yang tidak melakukan aktifitas penangkapan ikan. Capaian terhadap target produksi perikanan tangkap tahun 2022 dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 25.
Target dan Capaian Indikator Kinerja
Volume Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kategori
1.	Volume Produksi Perikanan Tangkap	Ton	21.845,74	21.223,40	97,15%	Sangat tinggi
Sumber : Laporan Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Tangkap Dinas Perikanan, Tahun 2022						

Volume produksi perikanan tangkap tahun 2022 hanya mencapai target sebesar 97,15% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh :

1. Produktifitas pelaku usaha perikanan tangkap masih rendah yang dicirikan oleh usaha skala kecil dan mikro;
2. Tingkat keberdayaan pelaku usaha perikanan tangkap masih cukup rendah (pendidikan, sarana, keterampilan, kelembagaan, teknologi, dan akses permodalan);

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

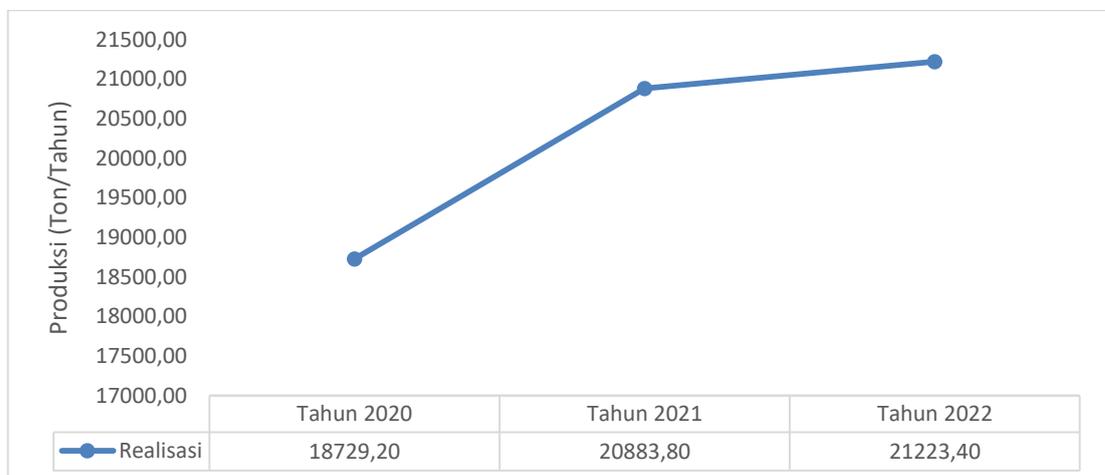
3. Masih tingginya kegiatan transaksi ikan di atas kapal (transshipment) dan belum maksimalnya ketersediaan sarana dan fasilitas pendaratan pada sentra dan subsentra pendaratan yang ada;
4. Adanya kelangkaan dan jangkauan ketersediaan BBM jenis solar berdampak pada menurunnya trip operasional penangkapan ikan oleh nelayan.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap adalah :

1. Pendampingan untuk nelayan, penguatan sarana dan prasarana produksi,fasilitasi akses pasar, dan peningkatan kapasitas nelayan;
2. Penyiapan kebutuhan BBM dan logistik perikanan dalam mendorong upaya penangkapan yang optimal;
3. Penguatan sentra-sentra produksi melalui pengadaan berbagai fasilitas kebutuhan nelayan, fasilitas rantai dingin dan mutu hasil tangkapan;

Produksi perikanan tangkap selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2020 – 2022 disajikan pada grafik dibawah:

Gambar 04.
Diagram Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator
Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020 - 2022



**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Peningkatan produksi perikanan tangkap yang terjadi dari tahun 2020 – 2022 sebagaimana digambarkan pada grafik di atas, disebabkan antara lain :

1. Mulai pulih Pasca pandemi covid 19 (2021);
2. Kondisi pasar cukup baik yang mendorong upaya penangkapan ikan secara maksimal;
3. Keberhasilan program/kegiatan/sub kegiatan yang selama ini (tahun 2020- 2022) dilaksanakan untuk meningkatkan produksi tersebut yakni pemberian sarpras, penguatan kelembagaan dan pemberian pelatihan alat tangkap ramah lingkungan.

3. Sasaran Program (3) : Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (S-4)

Dalam rangka mencapai sasaran program ini yang didukung oleh Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Dinas Perikanan menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja yakni Volume Produksi Perikanan Budidaya. Produksi Perikanan Budidaya adalah jumlah volume produksi perikanan budidaya yang dihasilkan oleh pelaku usaha pembudidaya di wilayahn Kabupaten Kepulauan Selayar, baik produksi budidaya laut (rumput laut dan ikan hidup), budidaya air tawar (Ikan lele dan nila), dan budidaya air payau (udang dan ikan bandeng). Jumlah produksi budidaya berdasarkan data triwulan tahun 2022, dan pengukuran capaian indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 26.
Data Produksi Perikanan Budidaya
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	84.79	164.17	159.12	135.42	543,50

Sumber : Laporan Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2022

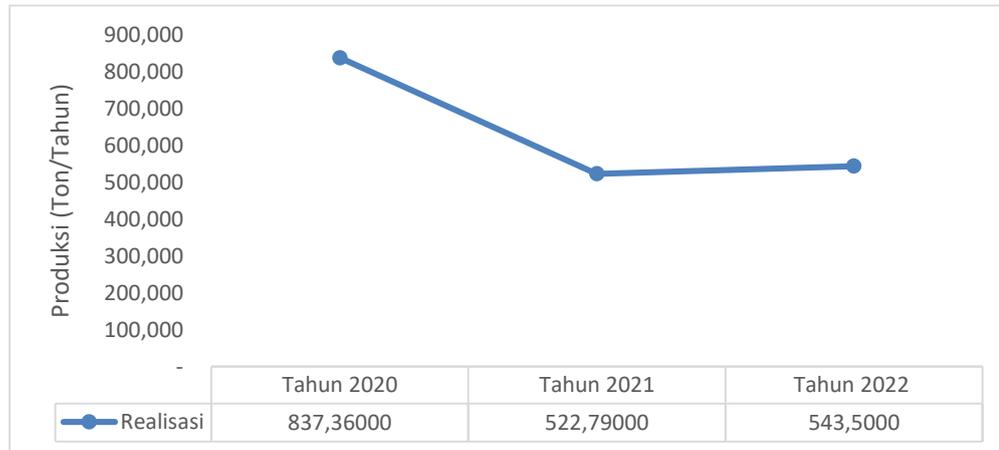
**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 27.
Target dan Capaian
Indikator Kinerja Volume Produksi Perikanan Budidaya
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kategori
Volume Produksi Perikanan Budidaya	Ton	976,72	543,50	55,64	Rendah
Sumber : Laporan Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2022					

Realisasi produksi perikanan tahun 2022 sebesar 543,50 ton atau hanya sebesar 55,64 % dari nilai yang ditargetkan dengan predikat rendah. Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi produksi perikanan budidaya antara lain kurangnya produksi rumput laut pada jenis R. Laut (E.Cottoni) karena gagal panel, komoditas ikan kerapu dan lobster juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tren penurunan komoditas kerapu dan lobster terjadi selama tiga tahun terakhir ini. Penurunan ini disebabkan turunnya animo masyarakat untuk menangkap (membudidaya). Komoditas yang lain juga mengalami penurunan yakni udang windu dan ikan Bandeng. Produksi perikanan budidaya tidak mencapai target tahun 2022 akan tetapi terjadi peningkatan produksi sebesar 20,71 ton atau sebesar 3,96 % jika dibandingkan tahun 2021. Peningkatan produksi ini terjadi di komoditas Vaname dan Rumput Laut.

Gambar 05.
Diagram Perbandingan Antara Target dan Realisasi
Indikator Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020-2022



Melihat data produksi perikanan budidaya dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir dapat dijelaskan bahwa produksi perikanan budidaya sangat dinamis. Adaperiode dimana produksi turun secara perlahan kemudian naik lagi secara perlahan, namun tiba-tiba naik secara signifikan dan kemudian turun secara drastis. Dinamisnya produksi tersebut disebabkan produksi komoditas rumput yang sangat dinamis. Apalagi komoditas rumput laut rata-rata menyumbang 65% hingga 80% dari total hasil budidaya. Dengan demikian, kalau produksi rumput laut jatuh, maka peningkatan komoditas lain tidak akan mampu mendongkrak peningkatan produksi.

Secara umum beberapa faktor penghambat pada pencapaian target indikator pada produksi perikanan budidaya antara lain :

1. Kondisi perairan 2 tahun terakhir (2021 dan 2022) yang kurang bersahabat dengan budidaya rumput laut sehingga banyak pembudidaya yang gagal panen;
2. Adanya bencana alam (banjir) di sentra produksi udang windu dan ikan bandeng di Pulau Jampea ;

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

3. Masih adanya penyakit udang vannamei yang setiap saat muncul dilokasi budidaya;
4. Pasar Ikan hidup masih belum sepenuhnya normal pasca covid 19 (Pasar luar negeri lesu);
5. Menurunnya minat pelaku usaha budidaya rumput laut akibat menurunnya harga jual produksi rumput laut di pasar.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya adalah :

- a. Melakukan sosialisasi kepada pembudidaya untuk dapat melakukan pergantian jenis rumput laut yang akan dikembangkan agar lebih tahan perubahan kondisi perairan, pendampingan pembudidaya, dan penyediaan sarpras;
- b. Melakukan revitalisasi lahan, terutama untuk pematang;
- c. Sosialisasi penanganan hama dan penyakit;
- d. Merangsang komoditas lain seperti ikan kuwe untuk pasar dalam negeri;

4. Sasaran Program (4) : Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan (S-5)

Sasaran program meningkatnya produk olahan hasil perikanan (S-5) didukung oleh 1 (satu) layanan program yaitu Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Pencapaian indikator kinerja sasaran ini dilihat dengan 1 (satu) indikator kinerja yakni volume produksi olahan hasil perikanan. Pengukuran indikator kinerja dilakukan melalui metode dan teknik pendataan oleh Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan Dinas Perikanan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut diketahui bahwa jumlah produksi olahan hasil perikanan tahun 2022 mencapai 241,77 ton dari target kinerja sebesar 186,57 ton atau mencapai 130 %. Pencapaian indikator kinerja

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

sasaran produksi olahan hasil perikanan tahun 2022 tidak terlepas dari terbukanya peluang pasar dan tersedianya bahan baku sebagai input dalam proses pengolahan hasil perikanan.

Adapun capaian kinerja pada indikator produksi olahan hasil perikanan diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 28.
Capaian Indikator Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Pengukuran
Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	186,57	241,77	129,59	Sangat tinggi
Sumber : Laporan Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan Dinas Perikanan, Tahun 2022					

Untuk membandingkan capaian target dan indikator capaian pada Produksi Olahan Hasil Perikanan selama 3 (tiga) tahun terakhir diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Gambar 06.
Diagram Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Volumen Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2020-2022



Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINAS PERIKANAN TAHUN 2022

Meskipun realisasi mencapai target, diperlukan upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja sasaran program melalui :

- a. Meningkatkan Daya saing produk olahan hasil perikanan.
 - b. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha pada aspek pengolahan dan pasar.
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung produksi pengolahan.
5. **Sasaran Program (5) : Meningkatkan Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Terhadap Peraturan Per-UU (S-6)**

Sasaran program ini didukung oleh layanan pada program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan berada di bawah tugas pokok Bidang Perikanan Budidaya. Pengukuran kinerja capaian sasaran program ini dilakukan melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya dalam Kabupaten/Kota Terhadap Perundang-undangan (%) dengan formulasi rasio jumlah pembudidaya yang telah mengikuti ketentuan perundang-undangan terhadap total pembudidaya ikan dalam kabupaten/kota.

Target kinerja tahun 2022 diproyeksikan sebesar 50 orang dari 949 orang pembudidaya ikan atau sebesar 5,27 % adalah persentasi dari penambahan jumlah pelaku usaha pembudidaya yang telah mengikuti ketaatan terhadap peraturan yang ada dari tahun sebelumnya. Sementara capaian kinerja sasaran program pada tahun 2022 ini belum mencapai hasil karena belum didukung oleh alokasi penganggaran program sehingga indikator capaian kinerja tidak ada dan pengukuran indikator tidak dilaksanakan. Tidak adanya alokasi anggaran disebabkan adanya rekomendasi dari tim asistensi anggaran (RKA) untuk tidak mengalokasikan anggaran pada program ini karena menganggap bahwa program ini tidak berada dalam kewenangan kabupaten/kota.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 29.
Capaian Indikator Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya dlm
Kabupaten /Kota Terhadap Perundang-undangan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya dlm Kabupaten /Kota Terhadap Perundang-undangan	%	5,27 % (50 dari 949 orang pembudidaya ikan)	0	Direkomendasikan dari tim asistensi anggaran (RKA) untuk tidak mengalokasikan anggaran pada program ini.
Sumber : Laporan Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Budidaya Dinas Perikanan, Tahun 2022				

3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Kinerja Sasaran Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan indikator proses (*intermediate outcome*) menuju indikator hasil (*outcome*) yang terbagi menjadi 3 (tiga) sasaran. Berikut ini, sasaran kegiatan Dinas Perikanan beserta indikator kinerjanya :

1. Meningkatnya Keberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Skala Kecil (S-7).
2. Meningkatnya Hilirisasi Produk Perikanan (S-8). Sasaran kegiatan ini memiliki 2 (dua) indikator yakni Jumlah Rekomendasi, Tanda Daftar, dan Izin Usaha Perikanan (IUP) yang Usahanya Dalam Satu Daerah Kabupaten /Kota yang Diterbitkan, dan Jumlah TPI dan Sentra pendaratan ikan yang Operasional;
3. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Usaha Perikanan (S-9). Sasaran kegiatan ini memiliki 2 (dua) indikator yakni Cakupan Bina Kelompok Perikanan Nelayan, dan Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan;

Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINAS PERIKANAN TAHUN 2022

Berikut analisis capaian kinerja masing-masing sasaran program Dinas Perikanan Tahun 2022 :

1. Sasaran Kegiatan (1) : Meningkatnya Keberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Skala Kecil (S-7)

Sasaran kegiatan ini diukur dengan 2 (dua) indikator yakni persentasi produksi perikanan kelompok nelayan dan persentasi Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil (POKDAKAN) yang diberdayakan. Adapun analisis capaian kinerja pada masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut.

Indikator 1 : Persentasi Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Indikator kinerja Persentasi produksi perikanan kelompok nelayan diformulasi dari rasio jumlah produksi perikanan kelompok nelayan terhadap total produksi perikanan tangkap. Guna mencapai realisasi kinerja ini didukung atas pelayan dari kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan pengukuran indikator dilakukan melalui metode pendataan produksi perikanan tangkap oleh Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan.

Berdasarkan data pengukuran kinerja, diketahui bahwa realisasi capaian kinerja sasaran kegiatan ini sebesar 5,881.25 ton dari target sebesar 9,696.07 ton atau mencapai 60,7 %. Hal ini bermakna bahwa kontribusi kelompok perikanan tangkap terhadap total produksi perikanan tangkap masih sangat rendah yaitu sebesar 27,71 % dari total produksi perikanan tangkap sebesar 21.223,40 ton di tahun 2022. Gambaran capaian kinerja atas indikator sasaran kegiatan produksi perikanan kelompok nelayan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 30.
Capaian Indikator Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Indikator Kinerja	Target (Ton)	Realisasi		Total Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
		Capaian (Ton)	(%)	
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	9,696.07	5,881.25	60.7	21.223,40
Sumber : Laporan Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2022				

Berdasarkan pengukuran kinerja dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa produktifitas kelompok nelayan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan belum maksimalnya kegiatan pemberdayaan kelompok nelayan, sehingga ke depan aktifitas kegiatan lebih focus pada peningkatan kapasitas kelompok nelayan dan penguatan kelembagaan kelompok nelayan.

Indikator 2 : Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (Pokdakan) yang Diberdayakan

Indikator kinerja pada Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (Pokdakan) yang Diberdayakan diformulasi dari rasio jumlah POKDAKAN yang diberdayakan terhadap total POKDAKAN dalam daerah Kabupaten/Kota. Pencapaian realisasi kinerja kegiatan ini didukung atas pelayan dari kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dibawah tugas pokok Bidang Perikanan Budidaya.

Pengukuran indikator capaian kinerja dilakukan melalui teknik dan metode pendataan oleh Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan. Adapun hasil pengukuran indikator tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 31.
Capaian Indikator Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil
(POKDAKAN) yang Diberdayakan

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kategori
Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN) yang Diberdayakan	Klp	4	7	175	Sangat Tinggi
Sumber : Laporan Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Selayar, Tahun 2022					

2. **Sasaran Kegiatan (2) : Meningkatkan Hilirisasi Produk perikanan (S-8)**

Sasaran kegiatan ini diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu 1. Jumlah Rekomendasi, Tanda Daftar, dan Izin Usaha Perikanan (IUP) yang Usahanya Dalam Satu Daerah Kabupaten /Kota yang Diterbitkan, dan 2. Jumlah TPI dan Sentra pendaratan ikan yang Operasional. Kedua indikator capaian kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut.

Indikator 1 : Jumlah Rekomendasi, Tanda Daftar, dan Izin Usaha Perikanan (IUP) yang Usahanya Dalam Satu Daerah Kabupaten /Kota yang Diterbitkan

Jumlah Rekomendasi, Tanda Daftar, dan Izin Usaha Perikanan (IUP) yang Usahanya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan diformulasikan sebagai Jumlah rekomendasi usaha, Tanda Daftar dan Izin Usaha Perikanan yang Usahanya Dalam Satu Daerah Kabupaten yang diterbitkan dari kegiatan pelayanan dan fasilitasi usaha kelautan dan perikanan. Adapun kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator ini meliputi kegiatan 1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, 2. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro, dan 3. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Kabupaten/Kota. Dan untuk melihat perbandingan target dan capaian dari indikator ini ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 32.
Capaian Kinerja pada Indikator Jumlah Rekomendasi, Tanda Daftar, dan Izin Usaha Perikanan (IUP) yang Usahanya Dalam Satu Daerah Kabupaten /Kota yang Diterbitkan

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentasi (%)	Kategori
Jumlah Rekomendasi, Tanda Daftar, dan Izin Usaha Perikanan (IUP) yang Usahanya Dalam Satu Daerah Kabupaten /Kota yang Diterbitkan	Rek	30	33	110	Sangat Tinggi
Sumber : Laporan Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Budidaya Dinas Perikanan, Tahun 2022					

Gambaran indikator berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja atas pelayanan kegiatan dinas mencapai nilai 110 %, atau dalam kategori sangat tinggi. Capaian kinerja ini memberikan makna bahwa pemberian rekomendasi, tanda daftar usaha, dan IUP perikanan merupakan upaya standarisasi usaha perikanan dalam rangka meningkatkan value produk perikanan, baik bahan baku maupun olahan. Sehingga ke depan perlu meningkatkan capaian indikator ini.

Indikator 2 : Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Sentra pendaratan ikan yang Operasional

Indikator Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Sentra pendaratan ikan yang Operasional diartikan sebagai jumlah TPI dan Sentra Pendaratan Ikan yang memiliki fasilitas pendaratan ikan dan sarana rantai dingin yang operasional. Pencapaian target indikator sasaran ini ditunjang dengan 2 (dua) layanan kegiatan, yaitu : 1. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI, dan

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

2. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 33.
Target dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah TPI dan
Sentra Pendaratan Ikan yang Operasional

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kategori
Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Sentra pendaratan ikan yang Operasional	Unit	1 TPI dan 1 Sentra	1 TPI dan 1 Sentra	100	Sangat Tinggi
Sumber : Laporan Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Tangkap Dinas Perikanan, Tahun 2022					

Indikator kinerja pada Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Sentra pendaratan ikan yang operasional diartikan sebagai jumlah TPI dan Sentra Pendaratan Ikan yang memiliki fasilitas pendaratan ikan dan sarana rantai dingin yang operasional. Fasilitas pendaratan ikan disediakan dalam rangka mendukung peningkatan jumlah produk perikanan yang didaratkan dan meningkatnya nilai tambah dari adanya hilirisasi produk perikanan mulai dari produksi hingga konsumen. Olehnya itu bentuk pelayanan dari sasaran dan indikator kinerja ini adalah tersedianya layanan pengelolaan pada TPI dan tersedianya fasilitas untuk mendukung rantai dingin dan rantai pasok produk perikanan pada lokasi pendaratan ikan.

Dari tabel di atas, terlihat gambaran pada capaian indikator kinerja dengan kategori ketercapaian sangat tinggi. Adapun yang dihasilkan sebagai indikator sasaran ini adalah adanya SOP pelayanan pada TPI Bonehalang dan relokasi (pembangunan) pabrik es di Desa Garaupa Kecamatan Pasilambena sebagai salah satu subsentra pendaratan ikan.

Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINAS PERIKANAN TAHUN 2022

Sebagai salah satu indikator pada proses (*intermediate outcome*) menuju kinerja hasil (*outcome*), maka capaian kinerja ini harus ditingkatkan ke depan pada subsentra dan sentra pendaratan ikan dalam wilayah kabupaten. Bentuk pelayanan yang harus ditingkatkan adalah fasilitas pokok, fasilitas penunjang, dan fasilitas pendukung dalam menunjang peningkatan jumlah roduk yang didaratkan dan berjalannya secara baik aktifitas rantai pasok dan rantai dingin.

3. Sasaran Kegiatan (3) : Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Usaha Perikanan (S-9)

Sasaran kegiatan yaitu Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Usaha Perikanan (S-9) diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu : 1. Cakupan Bina Kelompok Perikanan Nelayan, dan 2. Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan. Kedua indikator capaian kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut.

Indikator 1 : Cakupan Bina Kelompok Perikanan Nelayan

Indikator kinerja pada Cakupan Bina Kelompok Perikanan Nelayan diformulasi sebagai rasio dari jumlah KUB yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah dengan total KUB yang ada dalam daerah Kabupaten/Kota. Pencapaian target indikator sasaran ini ditunjang dari kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Sementara pengukuran kinerja capaian dilakukan melalui metode dan teknik pendataan oleh Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI. Adapun hasil pengukuran dan indikator capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 34.
Capaian Indikator Cakupan Bina Kelompok Perikanan Nelayan
Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Cakupan bina kelompok perikanan nelayan	KUB	30	68	226,67
Sumber : Laporan Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan Tahun 2022				

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa KUB yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 melebihi dari target yang direncanakan. Meskipun bantuan yang diberikan kepada kelompok tidak hanya berbentuk fisik sarana dan prasarana penangkapan ikan, tetapi juga dapat berbentuk peningkatan kapasitas kelompok. Selain itu bantuan yang disalurkan kepada kelompok nelayan terkadang tidak meliputi keseluruhan anggota kelompok tetapi hanya sebagian anggota sehingga anggota yang lainnya dalam kelompok harus menunggu penganggaran berikutnya. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Indikator 2 : Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan

Seperti halnya indikator kinerja pada Cakupan Bina Kelompok Perikanan Nelayan, indikator Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan juga diformulasi sebagai rasio dari jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah dengan total POKDAKAN yang ada dalam daerah Kabupaten/Kota. Pencapaian target indikator sasaran ini ditunjang dari kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Sementara pengukuran kinerja capaian dilakukan melalui metode dan teknik pendataan oleh Bidang Perikanan

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Budidaya. Adapun hasil pengukuran dan indikator capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 35.
Capaian Indikator Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan
Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	POKDAKAN	16	18	112,5
Sumber : Laporan Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Budidaya Dinas Perikanan, Tahun 2022				

Tercapaiannya realisasi target indikator sasaran kegiatan ini tidak terlepas dari ketersediaan anggaran dan berhasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

3.3 REALISASI KEUANGAN

Salah satu faktor yang mendukung tercapainya indikator dalam capaian kinerja adalah keuangan. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan jika didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan berasal dari anggaran APBD (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam mengimplementasi rencana strategis tahun 2021 - 2026 untuk tahun 2022 dialokasikan Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2,997.498.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.630.631.359,- dengan cakupan pelaksanaan 19 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan dalam 4 program. Berikut ini tabel realisasi belanja APBD :

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 36.
Realisasi Belanja APBD Dinas Perikanan Tahun 2022

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	2.997.498.000	2.965.458.247	98,93
2.	Belanja Langsung	7.630.631.359	7.300.773.288	95,68
Total Belanja		10.628.129.359	10.266.231.535	96,59

Realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program dinas untuk mendukung capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

Tabel 37.
Realisasi Belanja Langsung Dinas Perikanan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	Realisasi (%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.320.812.524	4.230.780.971	97,92
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	291.613.750	288.585.250	98,96
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99.209.00	98.758.000	99,55
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.428.700	6.408.700	99,69
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.641.950	5.231.950	92,73
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.073.000	4.983.000	98,23
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.087.500	4.886.000	96,04
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.403.300	8.633.300	82,99
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.770.300	159.684.300	99,95
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.024.648.900	2.992.599.147	98,94
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.997.498.000	2.965.458.247	98,93
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.150	10.000.150	100
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.198.700	8.198.700	100
4.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.842.550	3.842.550	100
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.354.000	2.344.000	99,58
6.	Penyusunan dan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.755.500	2.755.500	100
C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.492.000	50.492.000	100
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.492.000	50.492.000	100

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.581.500	314.581.500	99,68
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.200.000	2.200.000	100
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.300.000	3.300.000	100
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.687.500	7.687.500	88,49
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.800.000	7.800.000	100
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293.594.000	293.594.000	100
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.870.000	13.870.000	100
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.870.000	13.870.000	100
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.213.847	413.967.547	99,70
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.773.800	6.773.800	100
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.204.847	106.959.347	98,85
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.235.200	300.234.400	100
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.404.677	138.647.677	73,59
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.630.000	38.630.000	100
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.671.379	51.671.379	100
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.031.298	3.274.298	6,17
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.072.000	45.072.000	98,94
H.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.807.200	9.807.200	100
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.737.300	2.737.300	100

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

2.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.420.000	2.420.000	100
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.649.900	4.649.900	100
I	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	11.180.650	8.230.650	73,62
1.	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000	2.050.000	41,00
2.	Pengolahan Data Retribusi Daerah	6.180.650	6.180.650	100
II.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.453.673.405	4.289.775.624	96.32
A.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	46.719.000	46.522.600	99,58
1.	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	46.719.000	46.522.600	99,58
B.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.969.166.405	3.812.753.876	96,06
1.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	3.762.263.405	3.608.384.163	95,91
2.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	58.595.000	58.273.000	99,45
3.	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	148.308.000	146.096.713	98,51
B.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	437.788.000	430.499.148	98,34
1.	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	7.973.000	6.753.000	84,70
2.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	429.815.000	423.746.148	98,59
III.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	848.163.690	845.915.740	99,73
A.	Pemberdayaan Pembudi daya Ikan Kecil	58.430.000	58.397.000	99,94
1.	Pengembangan Pembudidaya Ikan Kecil	31.550.000	31.550.000	100
2.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	26.880.000	26.847.000	99,88

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

B.	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.505.000	16.500.000	99,97
1.	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.505.000	16.500.000	99,97
C.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	748.720.690	747.277.740	99,81
1.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	62.938.000	62.936.600	99,998
2.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	99.922.000	99,92
3.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	448.295.240	446.935.240	99,70
4.	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat	19.778.000	19.778.000	100
5.	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatn air untuk Pembudidaya Ikan di Darat	117.709.450	117.705.900	99,997
D.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.508.000	24.443.000	99,73
1.	Penetapan dan Persyaratan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif dan Serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing.	9.695.000	9.695.000	100
2.	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Perikanan Pembudidaya Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Tekonologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif dan serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing.	14.813.000	14.748.000	99,56

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

II.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.005.479.740	899.759.200	89,49
A.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	37.575.000	37.440.000	99,64
1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengelohan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah / Kabupaten	37.575.000	37.440.000	99,64
B.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	84.688.000	81.703.000	96,48
1.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	84.688.000	81.703.000	96,48
B.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	883.216.740	780.616.200	88,38
1.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	765.138.000	687.389.000	89,84
2.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	118.078.740	93.227.200	78,95

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari anggaran belanja langsung Dinas Perikanan tahun 2022 sebesar Rp. 7.630.631.359,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.300.773.288,- atau sebesar 95,68 %.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan ini adalah perwujudan dari sistem akuntabilitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan Tahun 2022, mulai perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, pengukuran kinerja, transparansi, koordinasi, dan pelaporan. Laporan ini telah menguraikan capaian kinerja melalui pengukuran indikator pada masing-masing sasaran kinerja. Demikian pula rencana tindak lanjut ke depan untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelayanan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022, belum sepenuhnya berhasil memenuhi target yang telah direncanakan dan diharapkan. Adapun sasaran kinerja Dinas Perikanan Tahun 2022 yang telah mencapai keberhasilan berdasarkan indikator-indikator kinerja adalah :

1. Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan sebesar 18,75 % dari target 55%, belum mencapai target.
2. Nilai PDRB Subsektor Perikanan (Rp M) dengan capaian 104 % yaitu 2.026,63 dari target sebesar 1.944,63.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perikanan sebesar 74,60 % dari target 71,45 %, melebihi target tetapi masih dalam indeks kategori kurang baik.
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Dinas Perikanan sebesar 58,36 %, mendekati target tetapi masih dalam indeks kategori “CC” (cukup).
5. Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan SAP, dengan kategori

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

sudah “sesuai”

6. Meningkatnya Produksi Perikanan, dengan capaian 95,37 %, yaitu 21.766,90 ton dari target sebesar 22.822,46 ton.
7. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap, dengan capaian sebesar 97,15 %, yaitu sebesar 21.223,40 ton dari target sebesar 21.845,74 ton.
8. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, dengan capaian sebesar 55,64 % yaitu sebesar 543,50 ton dari target sebesar 976,72 ton.
9. Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan, dengan capaian sebesar 130 % yaitu sebesar 241,77 ton dari target sebesar 186,57 ton.
10. Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Terhadap Peraturan Per-UU, dengan capaian 0 % dari target 50 orang atau 5,27 % dari total pembudidaya ikan dalam daerah kabupaten.
11. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan, dengan capaian sebesar 60,70 % yaitu sebesar 5.881,25 ton dari target sebesar 9.696,07 ton.
12. Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (Pokdakan) yang Diberdayakan, dengan capaian sebesar 175,0 % yaitu sebesar 7 (tujuh) kelompok dari target sebesar 4 (empat) kelompok pembudidaya ikan.
13. Jumlah Rekomendasi, Tanda Daftar, dan Izin Usaha Perikanan (IUP) yang Usahanya Dalam Satu Daerah Kabupaten yang Diterbitkan, dengan capaian sebesar 110 % yaitu sebesar 33 rekomendasi usaha dari target sebesar 30 rekomendasi usaha.
14. Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Sentra pendaratan ikan yang Operasional, dengan capaian sebesar 100 % yaitu 1 (satu) TPI dan 1 (satu) sentra pendaratan ikan dari target yang sama 1 TPI dan 1 sentra pendaratan.
15. Cakupan bina kelompok perikanan nelayan (KUB), dengan capaian sebesar

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**

223,33 % yaitu sebesar 67 KUB dari target sebesar 30 KUB.

16. Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), dengan capaian sebesar 112,5 % yaitu sebesar 18 kelompok dari target sebesar 16 kelompok.
17. Capaian Kinerja Dinas Perikanan, dengan capaian sebesar 149,61 % yaitu sebesar 94,30 % dari target sebesar 63,03 % terhadap realisasi fisik.
18. Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perikanan, dengan capaian sebesar 117,33 % yaitu sebesar 97,39 % dari target 83 % terhadap realisasi keuangan.

Pencapaian target beberapa indikator sasaran tahun 2022 tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama pihak-pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan terutama masyarakat sebagai pelaku utama dan subyek pembangunan. Selain faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian, juga terdapat kendala dan tantangan yang perlu diperhatikan ke depan, antara lain :

1. Beberapa target indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan strategis yang berada dalam kategori rendah, yaitu IKM dan LAKIP sehinggaperlu penyesuaian dalam dokumen perencanaan.
2. Masih rendahnya produktifitas pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya, yang didominasi dan dicirikan oleh usaha kecil dan mikro.
3. Masih rendahnya keberdayaan pelaku usaha perikanan masih rendah (pendidikan, sarana, keterampilan, kelembagaan, teknologi, dan akses permodalan).
4. Masih tingginya kegiatan transaksi ikan di atas kapal (transshipment) dan belum maksimalnya ketersediaan sarana dan fasilitas pendaratan pada sentra dan subsentra pendaratan yang ada.
5. Masih adanya indikator sasaran pada program yang belum mendapatkan alokasi penganggaran.

4.2 Tindak Lanjut

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Perikanan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berbagai permasalahan atau kendala diupayakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran. Upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai target tahun berikutnya adalah :

1. Melakukan perbaikan (reviu dan revisi) terutama target capaian kinerja pada dokumen perencanaan.
2. Mendorong peningkatan kapasitas SDM Aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, pengukuran kinerja, maupun evaluasi kinerja.
3. Menetapkan arah kebijakan yang lebih berorientasi pada pencapaian kinerja sasaran strategis, baik tata kelola organisasi maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat perikanan.
4. Mendorong partisipasi aktif seluruh pegawai agar terlibat dalam menyusun perencanaan kinerja hingga pengukuran kinerja.

Benteng, Februari 2023

Plt. KEPALA DINAS

ANDRIANY GUSRAM, S.Pi
NIP. 19810825 201001 2 029
Pangkat : Pembina

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022**